

PEMBANGUNAN IKN SEBAGAI MERCUSUAR STRATEGIS (KAJIAN KRITIS DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)

Chandra Adjie Prianggodo

Administrasi Publik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Kec. Banjarsari
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136
Email: chandraadjie29@gmail.com

ABSTRACT

This research attempts to describe the development of the National Capital City (IKN) as a beacon strategy in a sustainable development perspective. The IKN which has been set to be built at the regional level of Kalimantan Island, precisely in Penajam Paser Utara City, has a lot of potential to be studied scientifically based on data, analysis, predictions and development projections from the government. Critical studies in unraveling the reinforcing and inhibiting aspects in the development of IKN have been discussed in this study starting from environmental, social, equity, resource utilization, etc. In the context of sustainable development, the IKN development process can be observed in the long term. Based on the critical studies in this research, IKN received a lot of attention, which in outline is concerned about the weakening of natural ecosystems due to the density of activities in the future. The modernization of the era and technological advances provide strong references and encouragement to the government to apply appropriate policies in development activities, such as the Forest City concept in world cities. This study uses a methodology that utilizes scientific literature (literary study) as a basis for clarifying previous research, and adding new analyzes to test the quality of the prospects for the development of the IKN. The results of the study show that the development of IKN has a number of potential complex problems, especially long-term environmental sustainability. KN Kota Penajam Paser Utara as a replacement for Jakarta will definitely become a strategic beacon that will continue to grow and develop into a metropolitan-mega-city city in order to accommodate the needs of each buffer zone and encourage the accelerated growth of surrounding cities.

Keywords: *Development, Sustainable, IKN, Government, Strategic*

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha mengurai tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sebagai mercusuar strategis dalam perspektif *sustainable development*. IKN yang telah ditetapkan untuk dibangun pada tataran wilayah Pulau Kalimantan tepatnya Kota Penajam Paser Utara memiliki banyak potensi untuk dikaji secara ilmiah berdasarkan data, analisa, prediksi, dan proyeksi pembangunan dari pihak pemerintah. Kajian kritis dalam mengurai aspek-aspek penguat dan penghambat dalam pembangunan IKN telah dibahas dalam penelitian ini mulai dari aspek lingkungan, sosial, pemerataan, pemanfaatan sumber daya, dan lain sebagainya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), maka proses pembangunan IKN dapat dicermati secara jangka panjang. Berdasarkan kajian kritis dalam penelitian ini, IKN mendapat banyak sorotan yang secara garis besar esensi nya adalah mengkhawatirkan melemahnya ekosistem alami akibat kepadatan aktivitas di masa depan. Modernisasi era dan kemajuan teknologi memberikan referensi dan dorongan kuat kepada pemerintah agar menerapkan kebijakan tepat guna dalam aktivitas pembangunan, sebagaimana konsep *Forest City* di kota-kota dunia. Penelitian ini menggunakan metodologi yang memanfaatkan pustaka ilmiah (*studi kepustakaan*) sebagai basis untuk memperjelas penelitian sebelumnya, dan menambahkan analisa-analisa baru untuk menguji kualitas prospek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN memiliki sejumlah potensi masalah kompleks terutama keberlangsungan lingkungan hidup dalam jangka panjang. IKN Kota Penajam Paser Utara sebagai pengganti Jakarta sudah pasti akan menjadi mercusuar strategis yang terus tumbuh dan berkembang menjadi kota metropolitan-megapolitan dalam rangka mewadahi kebutuhan tiap-tiap daerah penyangga serta mendorong percepatan pertumbuhan kota-kota sekitar.

Kata Kunci: *Pembangunan, Berkelanjutan, IKN, Pemerintah, Strategis*

1. Pendahuluan

Pembangunan merujuk pada serangkaian transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan pemerintah menuju arah strategis. Transformasi dan proses perubahan strategis terencana merupakan definisi lain dari pembangunan dimana tujuan utamanya untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat (Kumba, 2019).

Pembangunan merupakan salah satu aspek yang mampu menunjang pertumbuhan suatu bangsa, negara, atau pun masyarakat. Efektivitas pembangunan terletak pada implementasi dan paradigma yang memicu lahirnya suatu pembangunan positif dalam skala besar, menengah, atau pun kecil. Manifestasi dari pembangunan tidak dapat dilepaskan dari intervensi pihak berwenang dalam mengakomodir kepentingan seluruh pihak terutama kepentingan bagi orang banyak (masyarakat).

Sifat dari pembangunan pada umumnya berorientasi pada kepentingan orang banyak, namun tidak menutup kemungkinan bahwa tujuan dari pembangunan memiliki permasalahan dan analisa-analisa yang kompleks terkait berbagai macam faktor baik positif, negatif, dan pertimbangan-pertimbangan lanjutan.

Pembangunan memerlukan adanya aspek khusus yang berkaitan dengan pandangan, kajian, musyawarah dan kontribusi masyarakat sebagai unsur atau objek dari pembangunan itu sendiri. Keterkaitan antara pembangunan dan kontribusi masyarakat sangat penting dan memiliki manfaat apabila proposal pembangunan yang dicanangkan pemerintah tidak diterima dengan baik. Secara garis besar, respon dari masyarakat adalah esensi utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan pembangunan yang mempertimbangkan masa mendatang tanpa mengabaikan modernisasi masa kini (kemajuan teknologi). Generasi mendatang akan menjadi sasaran bagi pembangunan dengan iklim berkelanjutan apabila terdapat pengarahan dan kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya secara bijak. Prinsip keadilan juga termuat dalam *sustainable development* karena distribusi sumber daya harus dipertahankan dan diwariskan lintas generasi dengan cara menghindari pemborosan (Tay & Rusmiwari, 2019).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki karakteristik penting tidak hanya dapat diuji dari sisi kualitas bangunan, akan tetapi penting untuk memperhatikan tingkat keamanan, kesehatan lingkungan, serta dampak terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), agenda dasar pemerintah adalah berorientasi pada mendorong dan mempersiapkan kebutuhan lintas generasi (Willar & Trigunarsyah, 2021).

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) merupakan salah satu langkah besar pemerintah Indonesia yang menuai banyak pandangan variatif dari berbagai elemen. Berbagai macam teori mulai dapat disandingkan dengan status IKN sebagai induk baru pemerintahan di masa depan beserta dengan prospek pengembangannya. Basis

pembangunan IKN secara gamblang telah membuka potensi baru untuk diuji kualitasnya sepanjang waktu, atau diprediksi oleh para ahli dan akademisi melalui penggunaan berbagai macam teori pembangunan berkelanjutan.

Tantangan pembangunan IKN dalam konteks *sustainable development* mulai disoroti dalam bentuk pro dan kontra terutama dari sisi sosial dan lingkungan. Visi Misi Indonesia emas di tahun 2045 menjadi landasan utama Pemerintah Indonesia dalam melahirkan gagasan pembangunan IKN yang diperkuat dengan realisasi percepatan kegiatan pembangunan di titik lokasi (Fristikawati et al., 2022).

Transformasi ekonomi menjadi salah satu capaian yang dikehendaki pemerintah di masa depan karena melalui pembangunan IKN di luar pulau Jawa maka kepadatan aktivitas bisnis dan ekonomi semakin meluas dan tidak hanya terpusat di Jakarta serta beberapa kota penyangga lainnya. Akan tetapi, Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia dan pulau yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi sedikit banyak akan dipengaruhi oleh pembangunan IKN seperti berdampak pada kualitas lingkungan hidup dan ekosistem. Potensi kerusakan alam yang sudah terjadi akibat penebangan hutan, penanaman sawit, dan aktivitas industri akan semakin besar jika perencanaan dan implementasi pembangunan tidak mengindahkan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam konteks kehidupan sosial masyarakat di wilayah pembangunan IKN serta wilayah-wilayah penyangga di sekitar, tentu memiliki potensi terciptanya kesenjangan antara warga masyarakat (Fristikawati et al., 2022).

Penelitian di atas memiliki esensi bahwa pembangunan IKN sangat potensial apabila pemerintah mengimbangi kesiapan, strategi, penerapan, dan tindakan sebagai representasi kepentingan masyarakat. Terkait dengan suatu kesenjangan yang mungkin muncul sebagai dampak dari pembangunan IKN adalah perihal kesenjangan kualitas SDM, kondisi perekonomian masyarakat, maupun keterampilan-pendidikan dimana tidak ada jaminan terciptanya pemerataan dalam waktu singkat (cepat). Kondisi masyarakat setempat bisa jadi menciptakan hambatan bagi pemerintah karena karakteristiknya sangat berbeda jauh dengan kota maju seperti Jakarta yang identitasnya telah terbentuk sejak lama, begitu pun dengan pemikiran dan kualitas masyarakat di Jakarta.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan senantiasa berjalan beriringan sebagaimana upaya untuk merealisasikan Indonesia Emas di 2045 melalui langkah perdana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Secara simbolis IKN dapat menjadi identitas nasional baru yang digandrungi, mewadahi setiap aktivitas berbangsa dan bernegara, serta bernilai unggul sebagai mercusuar perekonomian nasional (Hariati & Saputri, 2022).

Beragam aspek yang mungkin timbul untuk dijadikan pertimbangan dasar dalam pembangunan IKN oleh pemerintah seperti pengembangan infrastruktur, pemerataan pendidikan, pemangkasan kesenjangan masyarakat, pemberdayaan keterampilan, pemeliharaan

iklim harmonis antar masyarakat pribumi dan pendatang. merupakan serangkaian aspek vital yang perlu dikelola secara bijak.

Akan tetapi, visi utama dalam melakukan pembangunan IKN sebagai mercusuar nasional sangat penting untuk merujuk nilai-nilai fundamental dalam perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Jika diasumsikan ke dalam penjelasan rasional, pada dasarnya pembangunan berkelanjutan memiliki makna luas yang bersifat dinamis karena prinsipnya akan selalu mengikuti, menyesuaikan, dan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan input-input dari *stakeholder* terkait, sehingga pada akhirnya memerlukan *monitoring* berkala.

Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi di arus bawah, fakta nya pembangunan IKN telah memiliki kekuatan hukum tetap terhitung sejak tahun 2022 silam karena telah dibuktikan, disahkan, dan diundangkan melalui Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Maka dari itu proses pembangunan IKN dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2022 hingga memasuki 2023. Pembangunan IKN yang telah dipayungi dengan landasan hukum berwujud peraturan perundang-undangan merupakan bukti konkrit bahwa Pemerintah Indonesia memprioritaskan pertimbangan aspek hukum sebelum membuat gebrakan besar (Jalal, 2022).

Penelitian ini akan merumuskan tentang kajian kritis terhadap pembangunan IKN dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. IKN memiliki banyak aspek, faktor, dan potensi permasalahan baru yang menarik untuk dikaji satu per satu dan diperkuat dengan pendataan dari berbagai sumber ilmiah relevan seperti pustaka dari jurnal ilmiah, makalah, dan data-data sekunder pendukung di literatur internet.

Metodologi dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) karena peneliti memanfaatkan luasnya data pemaparan, penemuan, dan penelitian yang tersebar di internet dalam koridor pustaka ilmiah sesuai dengan tema dan kajian penelitian tanpa menuntut kehadiran peneliti secara langsung di lapangan (Darmalaksana, 2020).

Literatur penelitian ilmiah terkait pembangunan IKN hingga hari ini semakin banyak dan diminati oleh para akademisi karena kajian terhadap pembangunan IKN bersifat kebaruan, sehingga semakin banyak kajian yang meneliti tentang IKN maka akan membuka peluang untuk mengevaluasi perkembangan IKN dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

2. Pembahasan

Pembangunan IKN yang berskala nasional tidak akan pernah lepas dari sorotan publik baik bersifat pro dan kontra. Beberapa pihak mengkritik dengan dasar argumen yang jelas, pertimbangan logis, serta mengkhawatirkan keadaan mendatang dari berbagai aspek. Berikut adalah pembahasan konkrit yang dikutip dari berbagai sumber pemberitaan:

a) Realisasi Pembangunan, Pandangan Kritis *Multi-Stakeholder* & Kekhawatiran Ekosistem.

Dikutip dari CNN Indonesia (2022) bahwa Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memberikan pandangan tegas bahkan mempermasalahkan proses pembahasan RUU IKN sebelum disahkan menjadi UU dengan proses super cepat. Sikap dari Formappi sejalan dengan perspektif yang dibangun oleh salah satu juru bicara Partai Keadilan Sejahtera yang turut menganggap pembahasan RUU IKN penuh intrik, intervensi, serta motif khusus (CNN Indonesia, 2022).

Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) menilai proses penentuan lokasi dan pertimbangan daya dukung serta daya tampung kurang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian atau terkesan terlalu terburu-buru. Bergeser kepada ekosistem lingkungan hidup, permasalahan flora dan fauna juga bisa dianggap serius karena potensi dari kemungkinan lingkungan tercemar.

Dari sisi anggaran terkait pembangunan IKN secara keseluruhan pemerintah belum memiliki kepastian rinci, tindakan pemerintah hanya mengadakan alokasi dana sebesar 510 Miliar yang bersumber dari APBN 2022 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.



Gambar 1. Visualisasi IKN, Simbol Identitas Negara & Monumen Pancasila (Foto: Bahan Paparan Menteri PUPR)

Dikutip dari NiagaAsia (2019), bahwa wacana menjadikan status IKN sebagai simbol identitas negara bukan tanpa perencanaan semata. IKN sebagai pengganti Jakarta telah digagas dengan pemikiran visioner terutama paparan desain yang telah diselesaikan oleh Menteri PUPR dan dipresentasikan kepada Bappenas serta Presiden Jokowi. Di dalam dokumen berjudul “Bahan Paparan Gagasan Rencana & Kriteria Desain Ibu Kota Negara (IKN)” Menteri PUPR mengatakan bahwa visi IKN adalah sebagai katalis peningkatan peradaban masyarakat Indonesia. IKN sebagai representasi kemajuan bangsa unggul dengan mencerminkan 3 hal yakni (Niaga.Asia, 2023):

- Pertama, mencerminkan identitas bangsa
- Kedua, menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Ketiga, mewujudkan kota cerdas modern dan bersaing internasional



Gambar 2. Visualisasi Tata Kota Inklusif Sosial, Produktif Ekonomi, & Ramah Lingkungan (Foto: Bahan Paparan Menteri PUPR)

Ikatan Artisek Indonesia (IAI) memberikan masukan bahwa kriteria pembangunan layak yang bebas akses bagi publik tidak boleh serta merta hanya mengutamakan sisi bentuk, estetika, dan keindahan pembangunan (rancang bangun). Kriteria bangunan publik perlu diperkuat dari segi keamanan dan tingkat rigid (kesehatan/kekokohan).

Berdasarkan dengan data penjelasan di atas, jika ditarik garis besar maka status pembangunan IKN dalam perspektif *sustainable development* dapat dikatakan belum memenuhi unsur kajian dan kelayakan murni. Alasan yang mendasari adalah kekhawatiran logis dari berbagai *stakeholder* terutama ekosistem lingkungan.

Jika dianalisis berdasarkan latarbelakang kompleksitas permasalahan di Jakarta, maka terobosan baru dengan cara memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan tidak selamanya bisa dianggap sebagai solusi sistemik ketika dihubungkan dengan perspektif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Berfokus terhadap hak kebebasan dan kemerdekaan hidup bagi masyarakat asli Kalimantan merupakan pertimbangan bijak dan pemerintah yang bijak sepatutnya mewadahi seluruh perkembangan opini publik dalam rangka meneruskan prospek pembangunan dan pengembangan IKN seiring berjalannya waktu.

Mengakomodir seluruh ide dan gagasan publik yang bersifat logis bukan berarti perlu untuk merealisasikan dengan penuh. Peran pemerintah untuk melakukan *filter* dapat diperkuat dengan tindakan lanjutan (di kemudian hari), atau pun evaluasi sebagai alternatif ketika realisasi awal tidak berjalan efektif bagi kesejahteraan hidup masyarakat sekitar IKN.

b) Representasi Pemerintah Sebagai *Agent Of Development & Agent Of Planned Change*.

Pembangunan IKN merepresentasikan peran pemerintah sebagai agen pembangunan yang memelopori terobosan demi terobosan baru. Pembangunan IKN memiliki skala dan pendanaan besar sehingga layak untuk dianggap sebagai suatu fenomena. Terlebih lagi dengan membandingkan nilai historis kota Jakarta yang telah beberapa dekade bertahan menjadi mercusuar Indonesia.

Pemerintah merupakan agen ganda yang dapat melakukan pembangunan dan perencanaan dalam satu waktu. Definisi pemerintah sebagai *agent of change* yakni menghendaki adanya perubahan bagi masyarakat terutama di negara berkembang. Mendorong proses pembangunan secara signifikan demi menciptakan perubahan masyarakat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk proyek-proyek, program berjangka, dan perencanaan anggaran dapat diakumulasikan menjadi representasi pemerintah sebagai *agent of planned change* (Riwukore et al., 2022).

Analisis terhadap pembangunan IKN dapat disematkan dengan cara mengadopsi perluasan makna dari definisi *agent of change & agent of development*. Basis pertanggungjawaban pemerintah dalam perencanaan hingga realisasi pembangunan IKN lebih baik bersifat terbuka terhadap publik dalam rangka meminimalisir adanya praduga liar.

Memaknai representasi pemerintah sebagai agen ganda (*change & development*), maka pembangunan IKN adalah contoh proporsional untuk dikaji secara kritis. Dalam beberapa hasil penelitian yang telah berlangsung, pembangunan IKN memuat nilai potensial dalam kerangka pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*). Berikut analisis dan pembahasannya:

1) Analisis Konsep *Forest City* Dalam Pembangunan IKN

Wilayah IKN yang berada di provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan luas, terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi. Ditinjau dari kondisi saat ini, sekitar kurang lebih 59,50 persen luas hutan Pulau Kalimantan berfungsi sebagai paru-paru dunia, selain itu keanekaragaman habitat satwa endemik juga menjadi bagian dari wilayah IKN. Keseimbangan pembangunan kota berkelanjutan sangat diperlukan untuk mempertahankan pelestarian alam dan lingkungan. Era modern telah merubah mindset dari kota-kota di dunia untuk menciptakan konsep berkelanjutan seperti: *Sustainable City*,

Green city, Eco City dalam rangka mengantisipasi dampak sensitif lingkungan (Mutaqin et al., 2021).



Gambar 3. Visualisasi Pemetaan Wilayah IKN (Sumber: Bappenas)

Konsep *Forest City* merupakan serangkaian prinsip, kriteria, dan indikator pembangunan kota dengan mengacu pada keseimbangan lingkungan dan fungsi ekologis. Kualitas lingkungan hidup dalam memadai keanekaragaman hayati dan satwa adalah nilai standar ideal dari ciri pembangunan berkelanjutan dalam konsep *Forest City* (Mutaqin et al., 2021).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 turut memberikan rumusan sebagai prinsip pengembangan *Forest City* dalam rangka memperkuat perencanaan pembangunan IKN, dengan hasil sebagai berikut:

- a) Berbasis pengelolaan DAS
- b) Memiliki jaringan ruang terbuka hijau memadai
- c) Pemanfaatan sekitar 50% luas wilayah untuk lahan pengembangan lanjutan
- d) Efisiensi pengelolaan air perlu untuk dilakukan dengan bijak
- e) Beban pemenuhan konsumsi penduduk rendah
- f) Memiliki kualitas udara seimbang atau rata-rata sejuk
- g) Memiliki kualitas air permukaan yang baik
- h) Melindungi habitat satwa

Jika dianalisis, beberapa prinsip *Forest City* di atas sangat layak untuk dijadikan pedoman dalam pembangunan IKN sebagai kota berkelanjutan. IKN sebagai mercusuar nasional yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia sudah sepatutnya direalisasikan dengan prinsip kehati-hatian, serta realisasinya perlu untuk

diawasi terus-menerus oleh pemerintah. Bila perlu, pemerintah dapat melibatkan banyak pihak untuk turut serta memberikan evaluasi di tengah proses pengerjaan yang sudah berlangsung.

Total luas wilayah IKN sebesar 256.000 Ha yang telah divisualisasikan oleh Bappenas, merupakan lahan potensial sekaligus lahan sensitif apabila pengelolaan mengabaikan pembangunan berwawasan lingkungan. Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan berwawasan lingkungan juga termasuk karakteristik *sustainable development* ketika keanekaragaman hayati dan satwa terkondisikan dengan baik.

2) Proyeksi Perluasan Pembangunan Di Tengah Aset Ekosistem Alami

Keanekaragaman hayati dan satwa di pulau Kalimantan termasuk bagian dari wilayah sensitif langka. Berdasarkan data pada penelitian Mutaqin (2021), beberapa ekosistem sensitif langka yang perlu untuk ditindak secara berkelanjutan adalah:

Tabel 1. Sebaran Ekosistem Murni Tanah Kalimantan Timur

No	Jenis	Jumlah
1	Tumbuhan	527
2	Burung	180
3	Mamalia	100
4	Herpetofauna	25
5	Endemik/konservasi tinggi/dilindungi	- (Langka/Minim)

Sumber: Working Papers Bappenas (2021)

Keanekaragaman hayati di atas dapat dijadikan pedoman untuk mengelola pembangunan dan perluasan lahan IKN baik dalam jangka waktu dekat, menengah, hingga panjang. Status keanekaragaman hayati atau ekosistem lingkungan asli di tanah Kalimantan Timur, akan sangat berpotensi mengalami degradasi lingkungan.

Status kemurnian fungsi lahan yang sebelumnya terbuka bebas, dipaksa untuk memenuhi kebutuhan akan pembangunan IKN secara besar-besaran. Perkembangan IKN di masa depan dari segala sisi misalnya transportasi, kepadatan penduduk, serta kepadatan bangunan tentu akan mempengaruhi perubahan kualitas lingkungan alami menjadi lingkungan berbau perkotaan.

Teori mengenai pembangunan berwawasan lingkungan dalam kerangka berkelanjutan dari Sembiring (2022) memberikan gagasan kritis bahwa fungsi lahan terbuka hijau sangat menentukan kualitas kesehatan lingkungan dunia. Persoalan lingkungan dapat diantisipasi, pengurangan panas, pencegahan banjir, penghasil oksigen, penampung ketersediaan air. Pada intinya,

kawasan perkotaan di daerah-daerah luar sangat bergantung dengan kondisi kesehatan hutan.

Teori di atas sangat relevan dengan konsep *Forest City* yang mengedepankan keseimbangan pengelolaan tanpa mengesampingkan kualitas pembangunan fisik, bangunan, serta fasilitas-fasilitas penunjang modern. Berkaca dari Jakarta sebagai Ibu Kota Negara selama beberapa dekade ke belakang, dapat dicermati perubahan mengenai fakta kualitas lingkungan, pencemaran, polusi, dan semakin bertambahnya beban kota akibat tingginya aktivitas, bahkan diperparah dengan *eksodus urbanisasi* yang telah membudaya sejak lama.

Meminimalisir tingkat kerusakan ekosistem lingkungan dalam merupakan sebuah pilihan, ketika proyeksi pembangunan IKN tidak mungkin untuk mempertahankan kualitas ekosistem alami (termasuk habitat tumbuhan & satwa). Suatu pembangunan kota baru belum dapat dikategorikan sebagai pembangunan dengan prinsip berkelanjutan ketika tidak dibarengi dengan tindakan khusus pada lingkungan sekitar (lingkungan sasaran).

Mayoritas lahan IKN yang didominasi oleh kawasan hutan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menciptakan tata kota seimbang antara kemajuan fasilitas dengan jaminan pertumbuhan lingkungan. Ketika merealisasikan prinsip pembangunan yang kuat dan tidak mengesampingkan kualitas alam di kawasan hutan Kalimantan, maka iklim kehidupan baru di IKN berada dalam koridor zona hijau karena penghuni nya terkoneksi dengan alam (*connected with nature*).

c) **Pelibatan Masyarakat Sebagai Basis Meredam Nilai-Nilai Kontra IKN**

Pembangunan IKN yang tidak pernah luput dari sorotan berbagai pihak dapat ditampung oleh pemerintah sebagai bahan diskusi lebih lanjut. Melakukan perencanaan ulang dan revisi konsep pembangunan dengan cara melibatkan masyarakat secara langsung terutama masyarakat lokal sekitar wilayah IKN akan sangat menentukan besaran manfaat yang diperoleh dari pembangunan IKN.

Formulasi kebijakan haruslah dimulai dari pembidikan target yang tepat agar nantinya tidak terjadi ketimpangan sosial dan kecemburuan sosial. Proses Komunikasi dan Konsultasi yang baik pun diperlukan antara *stakeholder* agar menjadi bahan evaluasi yang tepat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan gebrakan baru (Ramadhan et al., 2020).

Maka dari itu berdasarkan teori di atas, pelibatan masyarakat dan kearifan lokal

merupakan skala paling efektif dalam menunjukkan kualitas pembangunan IKN secara nasional sekaligus alternatif logis bagi pemerintah supaya gejala penolakan proyek besar sekelas IKN dari berbagai sudut pandang masyarakat dan kelompok menjadi semakin terkikis.

Munculnya gejala kontra terhadap IKN tentu bermuatan nilai-nilai abstrak yang perlu diakomodir oleh pemerintah. Cara yang dapat dilakukan untuk mengakomodir sikap kontra terhadap IKN di antaranya adalah:

1. Sosialisasi

Mempublikasikan proses pembangunan IKN, nilai-nilai keunggulan atas rancang bangun, perencanaan fasilitas-fasilitas penunjang yang berorientasi profit, dsb. Sosialisasi visi dan orientasi pembangunan IKN dengan menonjolkan pertimbangan-pertimbangan ideal, seperti: beban Jakarta terlalu berat, mayoritas populasi masyarakat hidup di Pulau Jawa di tengah sekitar 17.000 pulau total bumi Indonesia.

2. Negosiasi

Prinsip pemerataan dalam membangun perlu untuk dinegosiasikan dengan baik terutama bagi warga masyarakat sekitar, supaya terjadi titik temu antara dua jalur (pemerintah & masyarakat).

3. Pemeliharaan & Pemerataan Sumber Daya

Pembangunan IKN di masa-masa awal seperti sekarang ini perlu untuk merujuk pada konsep tata kota modern berwawasan pemeliharaan sumber daya (lingkungan, tanah, air, ekosistem). Kesadaran masyarakat lambat laun akan terbentuk dan mulai membiasakan diri dengan pemeliharaan dan pemerataan sumber daya yang ditransfer besar-besaran dari daerah-daerah lain terutama Jakarta dan Pulau Jawa.

d) **Hambatan & Penguat IKN Sebagai Mercusuar Strategis**

IKN yang berada di tengah-tengah wilayah NKRI tepatnya Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur secara teritorial geografis sangat mumpuni untuk menunjang aktivitas pertumbuhan nasional. Daerah-daerah penyangga lokal bahkan internasional di masa depan akan sering menjalin interaksi dalam memperkuat hubungan dalam banyak bidang terutama ekonomi dan bisnis.

Hambatan pembangunan IKN bukan hanya datang dari pihak non-pemerintah, akan tetapi juga dari pejabat pemerintah. Perspektif menyikapi pembangunan kota mercusuar baru secara berkelanjutan memang tidak dapat dipukul rata, dikarenakan banyaknya faktor penyebab dari perkembangan opini masing-masing pihak (Saputra et al., 2021).

Berdasarkan karakteristik wilayah IKN, ancaman lingkungan tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu masyarakat sekitar memiliki peran penting dalam melatih perspektif dan kepekaan untuk menyesuaikan gaya hidup baru (membangun persepsi dan kesadaran).

Pembangunan jika tidak dibarengi dengan etika kesadaran berperilaku maka akan menimbulkan kekerasan dan sikap tidak peduli terhadap kepentingan masyarakat lain (acuh), termasuk terhadap kelestarian ekosistem alam dan lingkungan. Pembangunan yang hanya berorientasi pada peningkatan sektor ekonomi, akan menghambat kebutuhan sumber daya bagi generasi mendatang (Afandi et al., 2022).

Kesenjangan antar wilayah mulai dapat diprediksi di masa depan melalui pembangunan IKN sekali pun wacana pemerintah adalah melakukan pemerataan dari berbagai aspek (ekonomi, sosial, keamanan, pendapatan, pendidikan, dsb).

Di sisi lain, proyek pembangunan IKN adalah jawaban dari tingginya kepadatan (*overload*) Jakarta sebagai wilayah sentris. Menurut temuan Balitbang Palangkaraya (2018), Jakarta terlalu banyak menanggung beban dari banyak aspek. Selain sebagai ibukota negara, Jakarta juga menjadi dan pusat ekonomi nasional. Lalu lintas macet, sesak, kumuh, dan lebih rentan untuk memicu konflik universal. Ditinjau dari perspektif bencana, pulau Jawa sangat rentan akan bencana alami gempa bumi sehingga selalu berpotensi menimbulkan kerugian fisik dan jiwa. Tetapi pada fakta nya, Jakarta tidak pernah sepi dan selalu digandrungi oleh masyarakat berbagai penjuru untuk memperoleh perbaikan kesejahteraan hidup setiap tahunnya (Balitbang Palangkaraya, 2018).

3. Kesimpulan & Saran

Posisi IKN sebagai calon mercusuar strategis di Indonesia yang memanfaatkan potensi wilayah Pulau Kalimantan merupakan pilihan ideal jika ditinjau dari sisi kebebasan lahan. Luasnya lahan di Pulau Kalimantan yang telah berfungsi sebagai *grand design* dalam proses pembangunan IKN, telah memunculkan beberapa kekhawatiran terhadap ekosistem alami seperti tumbuhan dan hewan. Selain itu kekhawatiran dari berbagai faktor seperti pemerataan penduduk, kesenjangan sosial, serta eksploitasi sumber daya dalam skala dan jumlah besar menjadi sensitif ketika dikaitkan dengan prinsip *sustainable development*.

Pembangunan IKN hingga hari ini belum benar-benar dapat dipastikan memenuhi prinsip *sustainable development* karena belum ada uji lapangan. Status IKN masih bersifat pasif karena belum difungsikan layaknya mercusuar Jakarta yang sarat akan aktivitas penduduk mulai dari aktivitas sosial, ekonomi, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Keseriusan pemerintah dalam membangun IKN dan menjadikan IKN sebagai mercusuar strategis ditunjukkan melalui rencana pengembangan dan pemeliharaan kawasan hutan Kalimantan secara inklusif. Konsep *Forest City* yang dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup memiliki gagasan utama tentang efisiensi pengelolaan sumber daya dan air. Fakta demikian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perspektif *sustainable development*, karena memiliki proyeksi jangka panjang dalam bentuk atensi tinggi berbasis kepedulian hutan alam.

Di tengah berbagai pandangan kritis yang memprediksi iklim kehidupan IKN pada masa mendatang, proyeksi perluasan pembangunan IKN memiliki banyak celah yang perlu dibenahi, di antaranya adalah aset ekosistem alami seperti tumbuhan, burung, mamalia, endemik dilindungi, dan herpetofauna. Kekhawatiran dari berbagai *stakeholder* sejak awal perencanaan hingga pembangunan IKN menunjukkan bahwa pemerintah terkesan mengambil langkah cepat atau terkesan terburu-buru sehingga konsep, gagasan, dan ide pembangunan mendapat banyak sorotan dari segi seperti lingkungan, pemerataan pembangunan, kesejahteraan sosial, keamanan, dan hak hidup ekosistem sekitar.

Penelitian ini merujuk kepada pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi unggul dari IKN, sekaligus mengurai potensi permasalahan yang mungkin timbul di masa depan. Penelitian ini bersifat kritis-membangun, sebagaimana nilai utama yang peneliti angkat adalah tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Maka dari itu secara terbuka pemerintah dapat menjadikan hasil dari penelitian ini untuk memproyeksikan langkah-langkah ke depan untuk menguatkan kualitas IKN tanpa menggerus aset keanekaragaman murni.

Daftar Pustaka

- Afandi, S. A., Afandi, M., & Erdayani, R. (2022). *Pengantar Teori Pembangunan* (1st ed.). CV. Bintang Semesta Media.
- Asran Jalal, A. J. (n.d.). Relokasi Ibu Kota Negara Dan Dampak Ekonomi Politik Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. *Makalah*.
- Balitbang Palangkaraya. (2018, January 12). *Pemindahan Ibukota Negara Dalam Perspektif Kajian Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kajian Aspek Sosial Budaya (Wacana Palangka Raya Sebagai Ibukota Republik Indonesia)* [Go.id]. Balitbang Palangkaraya. https://balitbangkota.palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/sites/30/dlm_uploads/2019/05/KAJIAN-PEMINDAHAN-IBU-KOTA-NEGARA-RI.pdf
- CNN Indonesia. (2022, January 15). *Formappi: RUU IKN Supercepat, Sembunyi dan Minim Partisipasi Publik* [Media Online]. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220114152427-32-746748/formappi-ruu-ikn-supercepat-semunyi-dan-minim-partisipasi-publik>
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 5.
- Fristikawati, Y., Alvander, R., & Wibowo, V. (2022). Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749.
- Hariati, H., & Saputri, A. S. (2022). Best Practice Kebijakan Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Di Kalimantan Timur, Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(1), 16–28.
- Kumba, D. (2019). *TEORI PEMBANGUNAN* (1st ed.). Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13–29.
- Niaga.Asia. (2023, April 8). *Begini Visi dan Desain Ibu Kota Negara yang Baru*. Niaga.Asia Media Ekonomi dan Bisnis. <https://www.niaga.asia/begini-visi-dan-desain-ibu-kota-negara-yang-baru/>
- Ramadhan, M. R., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Penerapan Smart Education dalam Pembangunan Smart City di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1028>
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Saputra, S. D., J, T. G., & Halkis, M. (2021). Analisis Strategi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Kasus Upaya Pemindahan Ibu Kota Negara Dari DKI Jakarta Ke Kutai Kartanegara Dan Penajam Paser Utara). *Ekonomi Pertahanan*, 7(2), Article 2.
- Sembiring, T. B., & SH, M. (2022). *Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep Dan Teori)*. Penerbit Adab.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 217–222.
- Willar, D., & Trigunarsyah, B. (2021). Hambatan Penerapan Konstruksi Berkelanjutan: Perspektif Pemerintah. *MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL*, 27(1), 18–28. <https://doi.org/10.14710/mkts.v27i1.33764>